

SKRIPSI

**FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Guna untuk memperoleh sarjana strata satu (S1)



OLEH:
MUHAMMAD REZQI ALBYAN PRADANA
NIM.217130080

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI
Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif Tahun 2019
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD REZQI ALBYAN PRADANA

NIM : 217130080

PROGRAM STUDI

ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian, Skripsi

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Pembimbing II

Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902



Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI
LOMBOK TIMUR**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD REZQI ALBYAN PRADANA
NIM : 217130080
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 26 Juli 2021 Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

1. Drs. H. Darmansyah, M.Si (PU)
NIDN. 0008075914
2. Hidayatullah, S.IP., M.IP (PP)
NIDN. 0809038902
3. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si (PN)
NIDN. 0831126204



(.....)
(.....)
(.....)

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Bekas,**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : MUHAMMAD REZQI ALBYAN PRADANA

NIM : 217130080

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Mataram, 8 Agustus 2021

Mahasiswa,



Muhammad Rezqi Albyan Pradana

217130080



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZKA ALBYAN PRADANA
NIM : 217 130 080
Tempat/Tgl Lahir : BEKASI, 23 OKTOBER 1998
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 083 129 222 100 / albypradana98@gmail.com

Judul Penelitian :-

FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 53% 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 04-08-2021

Penulis



MUHAMMAD REZKA ALBYAN PRADANA
NIM. 217 130 080

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Isbandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REGA ALBYAN PRADANA
NIM : 217 130 080
Tempat/Tgl Lahir : BEKASI, 23 OKTOBER 1998
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 083 129 222 100 / albypradana98@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 04-08-2021

Penulis



MUHAMMAD REGA ALBYAN PRADANA
NIM. 217 130 080

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)
(QS. Al-Insyirah, 6:8)

“ Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”



PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua terutama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Agus Sumantri (bapak) dan Faiza Ariani (mama) yang selama ini telah membesarkan saya dan mendidik saya dengan baik. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga saya bisa berada di titik saat ini
2. Kakek dan Almh. Nenek, yang selama ini telah berjasa dalam hidup saya yang tiada henti untuk selalu berdoa dan memberikan semangat kepada saya
3. Adikku, Medina Makkahi Karin dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Pemerintahan.

Perjalanan panjang yang telah dilalui penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi skripsi. Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor UMMat
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, selaku Dekan FISIPOL UMMat
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP., Selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMMat
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama
5. Bapak Hidayatullah, S.IP.,M.IP., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping
6. Bapak Murnan, S.Pd selaku Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian

7. Segenap pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan informasi dan data dalam membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk kedua orang tuaku, Agus Sumantri (bapak) dan Faiza Ariani (mama) yang telah membimbing dan mendidik saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Teruntuk Kakek dan Almh. Nenek, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa kripsi masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengaharpkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Mataram, Juli 2021
Penulis

Muhammad Rezqi Albyan Pradana
NIM : 217130080

**FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Muhammad Rezqi Albyan Pradana¹, Hidayatullah², Darmansyah³

Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Partai politik memiliki peranan dan posisi yang sangat penting dalam suatu sistem demokrasi. Partai politik dalam sistem demokrasi tentu memiliki fungsi. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik untuk memperoleh jabatan politik melalui mekanisme yang telah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kab. Lombok Timur dalam menetapkan Calon Anggota legislatif dalam pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen politik, DPD PKS Kab. Lombok Timur mengacu pada AD/ART Partai dan peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam proses rekrutmen DPD PKS melaksanakan tahapan-tahapan rekrutmen yaitu, penjangkaran, penyaringan, dan penetapan. Dalam menetapkan calon anggota legislatif PKS memprioritaskan kader-kader internal, tetapi juga melihat potensi dari eksternal partai. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan DPD PKS Kab Lombok Timur dalam menetapkan calon anggota legislatif yaitu: Popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan calon anggota legislatif yaitu: *political socialization, political activity, occupational variable*, dan *Motivations*.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, DPD PKS

**POLITICAL RECRUITMENT FUNCTIONS OF PROSPEROUS JUSTICE
PARTY LEGISLATIVE CANDIDATES IN 2019 LEGISLATIVE
ELECTIONS IN EAST LOMBOK REGENCY**

Muhammad Rezqi Albyan Pradana¹, Hidayatullah², Darmansyah³.

**Student¹, Second Consultant², First Consultant³
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

Political parties have a crucial role and position in a democratic system. Political parties in a democratic system certainly function as in law number 2 of 2008 concerning political parties in article 11 paragraph 1. One of the functions of politics is political recruitment to obtain political positions through regulated mechanisms. This study aimed to determine how the Regional Representative Council of PKS carries out the political recruitment process. East Lombok in determining candidates for legislative members in the 2019 elections. This study uses qualitative research methods. Data collection techniques used are interviews and documentation. The results showed that in the political recruitment process, the Regional Representative Council of PKS East Lombok regency refers to the Party's AD/ART and existing regulations. In the recruitment process, the Regional Representative Council of PKS carries out the stages of recruitment, namely, screening, screening, and determination. In determining candidates for legislative members, PKS prioritizes internal cadres and looks at external parties' potential. The factors are taken into consideration by the East Lombok Regency PKS Regional Representative Council in determining candidates for legislative members are Popularity, acceptability, and electability. In addition, some factors are considered in determining candidates for legislative members, namely: political socialization, political activity, occupational variables, and motivations.

Keywords: Political Parties, Political Recruitment, Regional Representative Council (DPD) PKS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABLE.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1 Pengertian Demokrasi	14
2.3. Pemilihan Umum	15
2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum	15
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	15
2.4. Pengertian Partai Politik.....	16
2.4.1. Sistem Kepartaian	18
2.4.2. Fungsi Partai Politik.....	19
2.4.3. Tipologi Partai Politik.....	22

2.5.Pengertian Rekrutmen dan Rekrutmen Politik.....	24
2.5.1.Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.....	26
2.5.2.Prinsip-Prinsip Rekrutmen Politik	30
2.5.3.Model Rekrutmen Politik.....	33
2.5.4.Sifat-Sifat Rekrutmen Politik.....	34
2.5.5.Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik	35
2.5.6 Tipe-Tipe Rekrutmen Politik	36
2.6.Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif.....	37
2.7.Kerangka Berpikir.....	38
2.8.Definisi Konseptual.....	39
2.9.Definisi Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1.Metode Penelitian.....	43
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3.Sumber Data.....	44
3.4.Teknik Penentuan Responden.....	45
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6.Teknik analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1.Gambaran Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Timur	50
4.1.1.Tinjauan Umum Tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Timur.....	50
4.1.2.Visi dan Misi DPD PKS Kabupaten Lombok Timur..	51
4.1.3.Struktur Organisasi.....	51
4.1.4>Nama dan Lambang	53
4.1.5.Sarana dan Prasarana.....	55
4.2.Proses Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur	55

4.2.1.Penjaringan.....	57
4.2.2.Penyaringan.....	63
4.2.3.Penetapan	65
4.3.Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan DPD PKS Kabupaten Lombok Timur dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur.....	69
4.3.1. <i>Social Backround</i>	71
4.3.2.Political Socialization.....	72
4.3.3. <i>Initial political activity</i>	72
4.3.4. <i>Apprenticeship</i>	73
4.3.5. <i>Occupational variables</i>	74
4.3.6. <i>Motivations</i>	74
4.4.Pembahasan.....	75
4.4.1.Proses Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur	75
4.4.2.Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan DPD PKS Kabupaten Lombok Timur dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur .	81
BAB V PENUTUP	84
5.1.Kesimpulan.....	84
5.2.Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

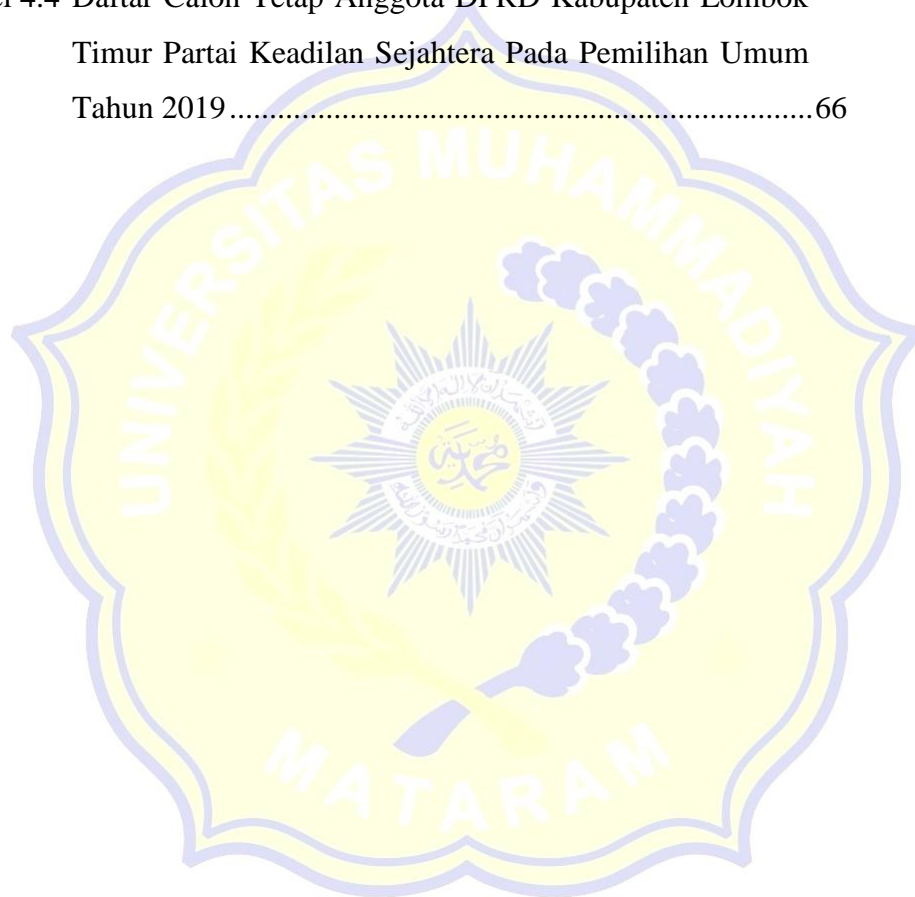
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>)	49
Gambar 4.1 Partai Keadilan Sejahtera	54



DAFTAR TABLE

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Penentuan Responden	45
Tabel 4.1 Susunan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur 2020-2025	52
Table 4.2 Arti Lambang Partai	54
Tabel 4.3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 51.....	57
Tabel 4.4 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang salah satunya memiliki karakteristik yaitu pemilihan umum (pemilu) yang bertujuan memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Pemilihan umum adalah sebuah metode perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam negara demokrasi, rakyat yang mempunyai kedaulatan paling tinggi yang mempunyai hak dalam menyuarkan pilihannya melalui pemilu untuk memastikan wakilnya sebagai anggota dewan. Pada era seperti saat ini rakyat tidak dimungkinkan untuk mewakili dirinya sendiri di dalam Parlemen Pemerintahan. Oleh karena itu rakyat harus memilih sosok yang akan menjadi wakilnya di parlemen. Sehingga partai politik dapat menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintahan yang ada saat ini.

Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik (Parpol) merupakan sarana berpartisipasi bagi setiap warga negara dalam proses pengelolaan suatu negara. Saat ini partai politik sudah sangat dekat disekitar kita. Sebagai lembaga politik. Lahirnya partai politik memiliki sejarah yang cukup panjang. Walaupun tidak terlalu tua, partai politik dapat dikatakan sebagai organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia yang lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan ia baru ada di negara modern (Budiardjo, 2008:397).

Partai politik di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai politik, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pada

pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian partai politik yang berbunyi Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang tersebut juga memuat tentang tujuan dan fungsi partai politik, persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia.

Sebagai pilar demokrasi tentu saja posisi partai politik sangat penting dan mendasar. Keberadaan partai politik tidak terlepas sebagai wujud partisipasi masyarakat. Secara umum partai politik memiliki fungsi untuk menyeleksi pemimpin politik membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mendengarkan kepentingan publik, dan juga menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Selain di atas tentang partai politik, partai politik juga memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu tugas dan fungsi penting partai politik selain fungsi-fungsi yang lain seperti: komunikasi politik, pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Di Indonesia fungsi rekrutmen politik bagi parpol menjadi sangat penting dan strategis semenjak negara ini memasuki era reformasi dan demokratisasi.

Setelah berhentinya rejim otoriter orde baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan turunnya Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah politik nasional, melalui amandemen konstitusi yang terjadi pada 1999-2002, fungsi rekrutmen politik yang dimiliki parpol dimasukkan ke dalam naskah perubahan UUD 1945. Di dalam pasal 6A ayat(2) mengamanatkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik (Haris dkk, 2016:39).

Dari penjelasan di atas dan berhubungan dengan fungsi rekrutmen politik yang tertuang di dalam pasal 11 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Maka dapat diketahui bahwa rekrutmen politik sangat penting dilakukan dengan tujuan merekrut orang-orang untuk bergabung menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pejabat publik di luar partai.

Namun, pada saat ini partai politik masih dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menyangkut tentang masalah rekrutmen. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh berbagai partai politik masih belum sepenuhnya terlaksana secara

baik. Pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik dalam proses pemilihan umum dan pilkada masih sering bermasalah dari segi tanggung jawab moral mereka terhadap kepentingan publik, dan sering terperangkap kedalam berbagai kasus suap, korupsi, dan *money politic* pada saat berlangsungnya masa kampanye. Para anggota-anggota partai yang telah diusung oleh partai politik tersebut memang telah menempuh proses seleksi yang dilakukan parpol atau gabungan parpol, baik melalui pemilu maupun pilkada, namun permasalahan kualitas rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol tersebut masih sering bermasalah.

Terkait buruknya kinerja partai politik dalam melakukan rekrutmen terhadap calon-calon pejabat publik terjadi karena partai politik belum maksimal dalam menjalankan fungsinya yang telah melekat pada dirinya dan diatur oleh Undang-Undang. Sebagian partai politik hanya melakukan proses rekrutmen pada saat menjelang pemilihan. Hal ini menyebabkan munculnya calon-calon pejabat publik yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya-tugasnya di dalam jabatan publik.

Pemilu legislatif 2019 merupakan kompetisi bagi setiap parpol untuk merekrut anggota calon legislatif (caleg) untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD untuk periode 2019-2024. Setiap parpol yang berkompetisi pasti memiliki cara rekrutmen yang berbeda-beda sesuai dengan sistem politik dari partai tersebut. Parpol memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan rekrutmen kepada orang-orang yang dinilai memiliki kualitas yang akan diusung untuk menjadi calon legislatifnya. Karena kualitas dari calon legislatif akan sangat mempengaruhi kualitas parlemen itu sendiri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang mendeklarasikan diri sebagai partai kader. Sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi partai yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi sebagai rekrutmen bagi calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan pengurus partai. Fungsi ini dilaksanakan secara terbuka infrastruktur kelembagaan yang berada pada tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsi ini berjalan seiring waktu yang selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya pada bidang penyiapan sumber daya manusia partai (Pratama, 2014:2).

Hal yang kemudian menarik untuk diteliti adalah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) bukanlah partai yang baru dan merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader. Tentu saja Partai Keadilan Sejahtera mengandalkan kualitas anggota kadernya.PKS Sebagai partai kader, relatif telah memiliki prosedur dan sistem kaderisasi yang baku dan berjenjang sesuai kebutuhan internal partai. Hal ini tertuang pada AD/ART PKS.

Pada Pemilu legislatif 2019 di tingkat DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera berhasil menempatkan kadernya sejumlah 50 kursi DPR RI dengan perolehan suara 11.493.666 (8,21 persen). Perolehan suara PKS ini melesit dibandingkan pada pemilu legislatif 2014 dengan perolehan suara PKS pada 2014 sekitar 6,79 persen atau 8.480.204 suara. (<https://nasional.kompas.com>)

Sedangkan pada pemilu legislatif (Pileg) DPRD kabupaten Lombok Timur periode 2019-2024 PKS memperoleh sejumlah 5 kursi DPRD Kabupaten Lombok

Timur. Perolehan ini menyamai pencapaian PKS pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2014-2019 yaitu sejumlah 5 kursi.

Tetapi ironisnya, kontestasi pemilihan anggota legislatif DPRD kabupaten Lombok Timur sedikit tercoreng karena adasalah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), karena diduga telah melakukan *money politic* dengan membagikan uang Rp 25.000. Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, caleg yang bersangkutan telah mengumpulkan warga di dua dusun di wilayah Dengan Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur (<https://wow.tribunnews.com>).

Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan ini tentu saja membuktikan bahwa proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik masih bermasalah dalam menetapkan calon anggota legislatif yang berkualitas. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses rekrutmen karena belum terciptanya sistem rekrutmen yang baku, terbuka, dan demokratis, baik di dalam internal berbagai partai politik maupun ketika suatu parpol ikut dalam suatu proses seleksi pejabat publik yang dilakukan dengan gabungan parpol lain pada pemilu dan pilkada. Sistem rekrutmen pada partai politik sangat penting dalam menciptakan kader yang, berperilaku baik, berintegritas, kredibel untuk memberikan calon anggota politik yang berkualitas kepada pemilih.

Berdasarkan latar belakang masalah telah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “FUNGSI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah Proses Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur pada pemilu tahun 2019?
2. Apa Sajakah Faktor yang menjadi pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur pada pemilu tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur pada pemilu tahun 2019

2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor yang menjadi pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur pada pemilu tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini dapat berguna bagi kalangan umum dan akademisi yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai pendukung pengembangan dan pengetahuan khususnya dalam pembahasan fungsi rekrutmen partai politik
2. Kegunaan praktis, sebagai media atau pembelajaran bagi masyarakat terhadap pembahasan fungsi rekrutmen partai politik
3. Kegunaan akademis, Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) di fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bagi penelitian selanjutnya sebagai rujukan untuk meneliti lebih jauh mengenai rekrutmen politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilaksanakan mengenai topik yang hampir sama dengan yang akan saya teliti ini. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah; *pertama*, penelitian yang dilakukan Resti Mutia Azri dengan judul penelitian Rekrutmen dan Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. Adapun teori yang digunakan adalah teori partai politik, teori rekrutmen politik, teori pelebagaan partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitannya adalah didalam melakukan rekrutmen anggota baru PKS menggunakan dua cara, yaitu pola rekrutmen individual (*al-da''wah al fardhhiyah*) dan pola rekrutmen institusional (*al-da''wah al-,amma*). Pola rekrutmen individual berbentuk pendekatan orang per-orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Pola rekrutmen DPD PKS kota padang masih tetap menggunakan pola rekrutmen individual (*al-da''wah al fardhhiyah*, hal tersebut terlihat dari wawancara yang dilakukan dengan ketua DPD PKS Kota Padang. Sedangkan terkait dengan kaderisasi PKS terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan partai lainnya. Secara umum, pengkaderan di kalangan PKS terdiri dari tiga jenis, yakni Tarbiyah, pengkaderan *underbrouw* PKS, dan pengkaderan formal kepartaian PKS sendiri. Sedangkan DPD PKS Kota Padang lebih menekankan kepada kaderisasi formal kepartaian dengan bergerak ditengah-tengah masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan Aisatul Husna dkk dengan judul Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai Gerindra pada Pemilihan Umum 2019 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori rekrutmen politik, teori pemilihan umum legislatif, dan partai Gerindra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah mekanisme rekrutmen anggota calon legislatif Partai Gerindra atau yang disebut dengan tahapan panitia penjangkaran khusus tingkat daerah merupakan tahap panjang yang harus dilaksanakan setiap menjelang pemilu. Prosesnya dimulai dari: 1). Pembentukan panitia penjangkaran khusus, 2). Sosialisasi ke seluruh kader, 3). Penjangkaran oleh kader, 4). Verifikasi bakal calon anggota legislatif, 5). Rapat pleno pemilihan umum internal, 6). Penetapan nomor urut calon legislatif, 7). Pengesahan dan pengajuan bakal calon anggota legislatif ke Dewan Pengurus Wilayah dan 8). Penetapan calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pola rekrutmen yang digunakan partai Gerindra yaitu pola terbuka. Masyarakat sudah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan partai Gerindra dapat menjadi calon anggota legislatif

Ketiga, penelitian yang dilakukan Mahathir Muhammad Iqbal dan Ahmad Syaiful Kurniawan dengan judul penelitian Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang). Teori yang digunakan adalah teori partai politik, dan rekrutmen politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah DPC PKB Kabupaten Malang dalam melakukan rekrutmen untuk perempuan diberikan kuota khusus

juga dengan menerapkan dan memperhatikan kuota khusus 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan rekrutmen dan ada yang khusus lagi terkait perekrutan anggota partai yakni dengan merekrut anggota dari Organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) seperti Muslimat dan Fatayat.

Keempat, penelitian yang dilakukan Hendra Sukmana dan Arsiyah dengan judul model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di dpd partai golkarkabupaten sidoarjo. Teori yang digunakan adalah teori partai politik, teori model rekrutmen politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah model rekrutmen calon anggota legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik Seligman dan Jacob. Dimulai dengan melaksanakan sosialisasi pendaftaran, Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran diri para calon anggota legislatif. Kemudian calon anggota legislatif yang sudah mendaftarkan diri tersebut mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh tim sembilan yang berlangsung selama beberapa bulan setelah mekanisme penjaringan selesai maka nama-nama yang lolos pada penjaringan akan dibawa ke sidang pleno untuk menentukan nomor urutnya. Dan tahap terakhir yaitu para calon anggota legislatif yang telah mendapatkan nomor urut tersebut didaftarkan ke KPU.

Kelima, penelitian yang dilakukan Ana Nurbaedah dan Halili dengan judul penelitian Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif di DPRD Kota Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori partai politik. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah pada

proses pencalonan anggota legislatif di DPRD Kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap,. Pertama,melakukan penjangran bakol calon. Sebagai agen partisipasi politik, parpol wajib menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam *decision makers* (pembuat kebijakan). Kedua melakukan penyaringan dengan kesesuaian persyaratan yang berlaku. Bagi calon anggota legislatif harus memenuhi persyaratan dari kedua partai yaitu persyaratan yang termuat dalam konstitusi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Resti Mutia Azri	Rekrutmen dan Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang	Pola rekrutmen yang digunakan DPD PKS kota padang masih tetap menggunakan pola rekrutmen individual (<i>al-da''wah al fardhhiyah</i>). Sedangkan DPD PKS Kota Padang lebih menekankan kepada kaderisasi formal kepartaian dengan bergerak ditengah-tengah masyarakat.
2	Aisatul Husna dkk	Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai Gerindra pada Pemilihan Umum 2019 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	pola rekrutmen yang digunakan partai gerindra yaitu pola terbuka. Masyarakat sudah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan partai Gerindra dapat

			menjadi calon anggota legislatif
3	Muhammad Iqbal dan Ahmad Syaiful Kurniawan	Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang)	Dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan DPC partai Kebangkitan bangsa kabupaten Malang memberikan dan juga menerapkan kuota khusus sebesar 30%
4	Hendra Sukmana dan Arsiyah	model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di dpd partai golarkabupaten sidoarjo	Model rekrutmen yang dilakukan DPD Partai golkar dimulai dengan sosialisasi,setelah itu pendaftaran calon anggota legislatif, selanjutnya calon anggota legislatif mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh tim sembilan,yang terakhir calon anggota mendapatkan nomor urut yang didaftarkan di KPU
5	Ana Nurbaedah dan Halili	Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif di DPRD Kota Yogyakarta.	Tahapan pokok pencalonan anggota legislatif di DPRD Kota Yogyakarta memalui beberapa tahap. Pertama, melakukan penjangingan bakal calon. Kedua, melakukan penyaringan dengan kesesuaian persyaratan yang berlaku.

Penelitian yang peneliti lakukan dengan kelima penelitian yang sudah dijelaskan di atas tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan. Posisi penelitian yang peneliti lakukan ini akan melihat dan mengukur pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji mengenai fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam menetapkan calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode yang sama yakni metode penelitian kualitatif yang berkaitan dengan pola rekrutmen politik oleh partai politik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.

Menurut Hidayansyah dkk (2018:185) Memberikan definisi tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan di dalam negara sebagai bentuk upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan yang berada di negara tersebut.

Firmansyah dalam (Oktaviana, 2020:18) Demokrasi adalah suatu sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang telah dibatasi oleh hukum dan kebiasaan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak seorang warga negara.

Budiardjo dalam (Oktaviana,2020:17) memberikan pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, demokrasi memiliki dua arti,. Pertama, demokrasi yang dihubungkan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat dapat diikut sertakan pada penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, demokrasi sebagai asas, yang mempengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga lahir istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila.

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Reynolds dalam (Labolo dan ilham, 2015:51) Pemilihan Umum (Pemilu) adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh pada pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan di dalam parlemen yang dilakukan oleh parta-partai politik dan para kandidat.

Sedangkan menurut Labolo dan Ilham (2015:51) Pemilu adalah arena kompetisi. Menang ataupun kalahnya para calon akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Dalam pemilu menentukan pilihan merupakan hak bagi setiap warga negara.

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Rose dan Mossawir dalam (Labolo dan Ilhan,2015:53) mengemukakan fungsi-fungsi dari pemilihan umum sebagai berikut

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun secara tak langsung
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah
3. Barometer dukungan rakyat kepada penguasa

4. Sebagai sarana rekrutmen politik

5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Selanjutnya Surbakti dalam (Labolo dan Ilham, 2015, 55-56) menjelaskan terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu, sebagai berikut:

Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*publik policy*) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang melihat rakyat yang berdaulat, tetapi dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan).

Kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga

Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat kepada negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ketiga ini tidak berlaku di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara-negara industri maju) meskipun sifatnya berbeda.

2.4 Pengertian Partai Politik

Menurut Budiardjo (2008: 403-404) memberikan definisi tentang partai politik. Secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk menjalankan programnya.

Sigmund dalam (Budiardjo 2008:404) menjelaskan definisi partai politik Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut Sartori dalam (Budiardjo 2008:404) partai politik adalah kelompok politik yang ikut dalam proses pemilihan umum, melalui proses ini, dapat menemptakan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

Budiardjo dalam (Sukmana dan Arsiyah, 2013:156) mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memiliki fungsi yaitu untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

Sedangkan Friedrich dalam (Budiardjo, 2008:404) memberikan definisi partai politik. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materil.

Sultou dalam (Wibowo, 2018:7) menjelaskan partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit atau banyaknya terorganisir, yang

bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan menjalankan kebijakan umum mereka.

Terkait dengan penjelasan di atas mengenai partai politik, jadi dapat dikemukakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang di dalamnya memiliki anggota-anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya yaitu adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperoleh kedudukan politik di suatu negara dengan cara yang telah ditetapkan konstitusional untuk melaksanakan tujuannya dan juga dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

2.4.1 Sistem Kepartaian

Menurut Duverger dalam (Labolo dan Ilham, 2015:32-35) menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu: (1) Sistem partai tunggal, (2) Sistem dwi partai, dan (3) Sistem Multi partai.

1. Sistem partai tunggal, Sistem ini mengandung dua pengertian, pertama, di dalam suatu negara memang benar-benar terdapat satu partai. Kedua, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, tetapi hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja.
2. Sistem Dwipartai, menurut istilah dalam ilmu politik, sistem dwipartai diartikan sebagai dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua teratas dalam pemilihan umum secara bergantian, dan dengan demikian mempunyai posisi dominan. Negara-negara yang

memakai sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Selandia Baru.

3. Sistem Multi Partai, sistem multi partai dipilih mengingat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang berada dalam masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili kelompok mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Negara yang menganut sistem multi partai ini yaitu Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia.

2.4.2 Fungsi Partai Politik

Setelah memahami definisi dari partai politik, kita menyadari bahwa kehadiran parpol yaitu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem demokrasi di suatu negara di dunia ini termasuk di Indonesia. Sehingga partai politik memiliki fungsi. Adapun fungsi partai politik yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

Firmanzah dalam (Labolo dan Ilham, 2015:16) mengatakan peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, parpol berperan dalam melakukan pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi setiap anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan fungsi eksternal partai politik berkaitan dengan ruang lingkup yang luas yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena parpol memiliki

tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Sedangkan Almond dan Powell dalam (Labolo dan Ilham, 2015:16) menyebutkan partai politik memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Rekrutmen politik;
2. Sosialisasi politik;
3. Artikulasi dan agregasi kepentingan.

Budiardjo (2008: 405) menjelaskan tentang fungsi partai politik di dalam suatu negara demokrasi sebagai berikut :

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyampaikan aspirasi warga negara dan mencoba menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Partai politik melakukan penggabungan pendapat dan aspirasi masyarakat yang sama. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*Interest aggregation*). Setelah melakukan penggabungan pendapat dan aspirasi yang tadi sudah diolah dan dilakukan perumusan dalam bentuk yang lebih teratur proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Jika tidak ada yang melakukan agregasi dan artikulasi maka pendapat atau aspirasi tersebut akan menjadi simpang siur dan saling berbenturan. Sedangkan jika ada agregasi dan artikulasi kepentingan maka kesimpang siuran dan benturan tersebut dapat dikurangi. Agregasi dan artikulasi merupakan salah satu fungsi komunikasi politik.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Pada ilmu politik sosialisasi politik dapat disebut sebagai sesuatu proses yang dilalui seorang mendapatkan perilaku serta orientasi terhadap fenomena politik, yang biasanya berlaku di dalam masyarakat tempat dia berada. Dia merupakan bagian dari proses yang menentukan perilaku politik seorang, misalnya seperti, kelas sosial, nasionalisme, pandangan hidup, suku bangsa, hak serta kewajiban.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berhubungan dengan permasalahan proses seleksi mengenai kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai ataupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Demi kepentingan internal, partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, dengan kader yang berkualitas dapat menjadikannya memiliki peluang untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan kesulitan untuk menentukan pemimpinnya sendiri serta memiliki kesempatan untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Konflik senantiasa terjadi di masyarakat, baik di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi sosial-ekonomi, etnis (suku bangsa), ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut pasti menyimpan potensi konflik. Di sini fungsi partai politik dibutuhkan guna membantu menyelesaikan, atau untuk meminimalisirnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Elite partai dapat

menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

2.4.3 Tipologi Partai politik

Labolo dan ilham (2015, 28-30) memaparkan tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai dibedakan menjadi partai massa/lindungan, partai kader, serta partai *catch-all*.

1. Partai massa

Partai massa atau partai lindungan (*patronage*) merupakan partai yang lebih mengutamakan serta mengandalkan jumlah anggotanya. Partai tipe ini mengerahkan massa dengan sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat agar elektabilitas partai dalam pemilihan umum bisa meningkat. Biasanya basis partai ini didasarkan pada kelas sosial tertentu, seperti barang kecil. Selain itu bisa juga berbasiskan agama. Para pendukung partai ini cenderung bergabung karena adanya kesamaan identitas sosial ketimbang ideologi atau kebijakan. Partai ini lebih bersifat egaliter dan merakyat sehingga mudah diterima oleh masyarakat menengah ke bawah. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa partai massa lebih baik dari partai kader dalam urusan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Banyaknya basis massa partai jenis ini disebabkan oleh karena partai ini merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan

dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat secara umum.

2. Partai kader

Partai kader merupakan partai yang tidak menekankan kepada jumlah anggotanya tetapi terfokus kepada pembentukan loyalitas dan disiplin anggotanya sehingga dapat membentuk sebuah partai yang solid. Partai ini mengasumsikan bahwa dengan yang sedikit maka tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai. Proses pembentukan loyalitas serta disiplin yang tinggi tersebut tercermin dari proses seleksi anggota yang sangat ketat dan berjenjang. Tidak hanya itu, penegakan disiplin kepada anggota-anggotanya konsisten dan tanpa pandang bulu.

3. Partai *Catch-All*

Partai ini serupa dengan partai massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, partai *catch-all* menyatakan bahwa partainya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Orientasi dari partai ini adalah semata-mata untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu, isu yang disampaikan ketika kampanye kerap kali berubah-ubah bergantung kepada isu yang sedang populer di kalangan pemilih. Partai *catch-all* juga sering disebut sebagai partai *Rational-Efficien* atau partai *Electoral-profesional*

Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi objek penelitian peneliti merupakan partai kader. PKS merupakan partai politik yang telah lama berdiri di Indonesia dan mendeklarasikan diri sebagai partai kader. Sebagai partai kader

Partai Keadilan Sejahtera tentu saja lebih mengutamakan kualitas anggota kadernya sendiri dalam membangun politik. Prosedur dan sistem kaderisasi yang dilakukan PKS juga baku dan sistematis yang telah tertuang di dalam AD/ART PKS.

Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Pratama yang mengatakan bahwa PKS sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Proses kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai (Pratama, 2014:2).

2.5 Pengertian Rekrutmen dan Rekrutmen Politik

Secara umum Rekrutmen merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.. Secara khusus dalam konteks politik, rekrutmen politik sering mengacu pada proses seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif (Syamsudin dkk, 2016:9).

Menurut Simamora dalam (Purwitasari, 2014:4) mengartikan rekrutmen sebagai serangkaian kegiatan mencari serta menarik pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Sedangkan Schermerhorn dalam (Purwitasari, 2014:4). berpendapat rekrutmen sebagai proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong. Perekrutan yang efisien akan membawa kesempatan pekerja kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan.

Purwitasari (2014:4) menjelaskan tentang rekrutmen politik adalah proses mencari anggota baru dan mengajak orang yang memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam proses politik (pengkaderan). Dibentuknya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan buruh, petani, mahasiswa, pemuda, wanita, dan organisasi lainnya, diberikan kesempatan untuk ikut dalam politik. Dengan diberlakukannya rekrutmen ini hendak menjamin kehidupan partai, sekaligus menjadikan salah satu metode untuk menyeleksi calon pemimpin. Bagi partai politik rekrutmen politik merupakan salah satu tugas dan fungsi yang penting selain dari fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta rekrutmen politik.

Menurut Koirudin dalam (Mustama dan Suranto, 2016:399) Rekrutmen politik adalah sesuatu proses seleksi ataupun rekrutmen anggota- anggotadari kelompok yang bertujuan untukmewakili kelompoknya pada jabatan-jabatan publik ataupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem ataupun prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda.dalam melaksanakan mekanisme rekrutmen, partai politik sepatutnya bisa menciptakan anggota-anggota politik yang bermutu di masyarakat.

Sedangkan menurut Haryanto dan Surbakti dalam (Fitriyah, 2020:3) menjelaskan tentang definisi rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses yang dilakukan partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang yang memiliki bakat untuk bergabung dalam proses politik. Rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik bukan hanya sebatas mencari anggota baru, melainkan juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Tidak hanya itu rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai bentuk cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara bertujuan untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin pada sistem politik secara umumnya dan pemerintahan secara khususnya.

Surbakti (2010:150-151) menjelaskan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya

Rekrutmen politik seperti yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen politik adalah kegiatan partai politik untuk mencari dan menyaring warga negara yang ingin diikutsertakan pada proses pemilihan umum. Disamping itu juga untuk disiapkan menjadi generasi-generasi yang berada di dalam partai politik tersebut.

2.5.1 Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Surbakti dalam (Silalahi dkk, 2019:134). mengungkapkan mengenai fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik. Untuk melahirkan anggota-anggota legislatif yang memiliki kualitas dan memahami segala aspirasi dari masyarakat

disaat itu partai politik dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsinya yang sangat penting ini merupakan fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik yang dilaksanakan yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau suatu kelompok untuk menjalankan beberapa peran dalam sistem politik secara umum dan pemerintah secara khusus.

Sebagai sarana rekrutmen politik peran partai politik sangat penting bagi berjalannya sistem politik. Karena tanpa elit politik yang dapat melaksanakan perannya, sistem politik akan terancam. Oleh sebab itu partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memiliki andil yang besar perihal :

1. Mempersiapkan kader-kader pimpinan politik
2. Melakukan seleksi kepada kader-kader yang telah dipersiapkan
3. Perjuangan untuk menempatkan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki integritas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis (Yuliono, 2013:179).

Fungsi dari partai politik dalam hal rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen politik di negara otoriter

1. Rekrutmen Politik di negara demokrasi, fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik ini berhubungan erat dengan permasalahan dalam seleksi kepemimpinan, baik itu kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional secara umum. Untuk kepentingan internalnya, tiap partai perlu kader-kader yang bermutu, karena, dengan kader yang demikian partai politik bisa menjadi partai yang memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan diri. Dengan memiliki kader-kader yang

baik, partai tidak akan sulit memastikan pemimpinnya sendiri serta mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Budardjo, 2008:408).

2.Rekrutmen Politik di negara otoriter, Di negara otoriter parpol juga memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Di dalam negara otoriter lebih mengutamakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengabdikan kepada partai, yang menguasai ideologi Marxisme-Leninisme, dan yang kelak bisa memperoleh kedudukan pimpinan yang bertujuan mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu calon anggota harus menjalani masa percobaan yang wajib memenuhi standar-standar ketat mengenai pengabdian dan kelakuan, baik individu ataupun di depan umum, yang telah ditetapkan oleh partai komunis. Dikarenakan iklim politik yang tidak kompetitif maka pemilu tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan negara, melainkan lebih bersifat sebagai bukti dari loyalitas rakyat kepada negara dengan memilih calon yang ditetapkan oleh partai (Budiardjo, 2008: 411-412)

Fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik menjadi salah satu fungsi partai bekerja untuk merekrut masyarakat agar ikut berperan aktif dalam proses politik. Rekrutmen menjadi hal yang penting, karena merupakan posisi fundamental partai politik dalam sistem demokrasi. Sehingga partai politik akan melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat dalam mekanisme demokrasi,

rekrutmen yang dilakukan partai politik akan menentukan kualitas kepemimpinan masyarakat (Adela, 2012:3).

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pada Pasal 29 mengatur ketentuan lebih lanjut dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu sebagai berikut dalam ayat 1 sampai ayat 3:

1. Ayat (1), partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. Anggota partai politik
 - b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Bakal calon Presiden dan wakil Presiden
 - d. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ayat (1a), Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

2. Ayat 2, rekrutmen sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

3. Ayat 3, penetapan atas rekrutmen sebagaimana di maksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai AD dan ART.

Partai politik sebagai rekrutmen politik memiliki kepentingan untuk memperluas atau memperbanyak anggotanya. Oleh sebab itu parpol berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota partainya. Dengan didirikannya organisas-organisasi masa (sebagai *underbouw*) yang melibatkan kelompok-kelompok buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas (Wibowo, 2018:36).

2.5.2 Prinsip-Prinsip Rekrutmen Politik

Haris dkk (2016:61-62) Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Rekrutmen. Partai politik dalam melakukan rekrutmen idealnya berlaku secara umum dalam proses kandidasi. Maka dari itu ada 10 prinsip yang perlu menjadi rujukan bagi parpol dalam melakukan rekrutmen.

Pertama, loyalitas yaitu kesetiaan pada partai merupakan landasan penting bagi politisi untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan ideologi partai. Dengan kesetiaan kepada partai, seorang politisi akan lebih memahami jati diri partai di samping memperbanyak pengalaman politisi itu sendiri untuk berkarir dan berkontribusi bagi keberlangsungan partai politiknya. Dalam rekrutmen pengurus dan pejabat publik partai politik perlu melihat faktor loyalitas dengan memberikan kesempatan kepada kader yang telah lama berjuang untuk partai. Ada syarat minimal masa anggota, untuk dapat duduk di kursi legislatif/pemerintahan sebaiknya minimal 1 tahun.

Kedua, bersih. Kader, Anggota, serta pengurus partai politik ialah politisi yang akan mewakili rakyat, baik di lembaga legislatif ataupun eksekutif. oleh sebab itu, sebisa mungkin para anggota tersebut harus terhindar dari perbuatan tercela, baik yang melanggar norma agama, sosial, ataupun kepentingan publik. oleh sebab itu, partai politik butuh menjaga organisasinya dari para politisi yang tidak terpuji serta lebih memberikan peluang pada kader yang bersih ataupun tidak tercela dalam tahap proses rekrutmen.

Ketiga, transparansi/keterbukaan. Transparansi atau keterbukaan ialah prinsip yang harus dianut dalam setiap mekanisme rekrutmen terutama bagi pengurus dan pejabat publik. Prinsip transparansi yang dicontoh dalam hal ini meliputi banyak hal. Contohnya adalah profil politisi dan partai politisi, mekanisme rekrutmen serta kapasitas politisi baik pada sisi kualitas pendidikan maupun kemampuan ekonomi. Dari proses rekrutmen, profil calon, transparansi keuangan calon dan partai.

Keempat, akuntabilitas. Pada proses rekrutmen semestinya dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada anggota partai namun juga kepada masyarakat. Setidaknya melalui proses rekrutmen terbuka, partai politik membuka diri dalam hal mekanisme dan calon yang diseleksi kepada masyarakat, terutama kepada konstituennya. Dengan demikian partai politik akan berupaya menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya yang bermanfaat untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.

Kelima, meritokrasi, di dalam rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, partai politik setidaknya harus mengesampingkan mekanisme rekrutmen

yang didasarkan pada kedekatan individu, termasuk kultural dan kekeluargaan. Idealnya, seleksi mengacu kepada keahlian dan ikatan ideologi diawali dari rekrutmen anggota partai, terlebih lagi untuk seleksi pengurus dan pejabat publik harus didasarkan pada kecakapan teknis, keahlian, dan pengalaman organisasi. Pada proses rekrutmen ini diharapkan dapat menghasilkan politisi yang berkualitas.

Keenam, demokratis (*fairness dan inklusif*). Demokratisasi pada proses rekrutmen diperlihatkan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses dimana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusif dibandingkan sebelumnya. Ditentukan bukan oleh segelintir elite, anggota ikut serta berperan dalam nominasi. Egalitarian, keadilan.

Ketujuh, *decentralized/autonomous*. Dalam penentuan kandidat, seleksi caleg yang dilakukan oleh pengurus partai pada tingkat pusat ataupun tingkat daerah semestinya dilaksanakan secara proporsional. Artinya pengurus partai yang berada di daerah tidak bisa menyeleksi kandidat tanpa intervensi pimpinan dari pusat partai. Begitu juga dengan pimpinan partai yang berada di pusat tidak semestinya menetapkan kandidat politisi tanpa ada masukan dari anggota dan/atau pengurus partai di tingkat daerah.

Kedelapan, kecukupan pembiayaan (*financial-sufficiency*) partai politik dalam menjaring anggota baru hendaknya melihat kemampuan calon anggota dalam memberikan dukungan finansial. Iuran secara rutin dari anggota sangat berharga bagi parpol untuk memperlebar jangkauan pengaruhnya termasuk meningkatkan kualitas organisasi. Prinsip kecukupan pembiayaan kampanye bagi

calon secara mandiri. Pembiayaan partai akan cukup jika semua anggota partai mempunyai kemampuan ekonomi memberikan kontribusi pendanaan secara reguler.

Kesembilan, humanis, keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa melihat status sosial-ekonomi merupakan prinsip dalam rekrutmen ini. Prinsip ini juga menekankan pada orientasi *output* dan *outcome* dari rekrutmen yang menuju pada rasa empati terhadap kemiskinan, lingkungan sosial, serta empati pada minoritas.

Kesepuluh, non-partisipan. Prinsip ini rekrutmen politik ini berlaku bagi pihak yang menyeleksi. Saat melakukan seleksi pengurus, calon legislatif dan calon pejabat eksekutif, tim penyeleksi harus memperlakukan calon dengan hak yang sama. Di dalam proses seleksi juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap calon tertentu. Penyeleksi juga tidak diperbolehkan memberikan perlakuan istimewa kepada calon memiliki kedekatan emosi atau kultural dengan dirinya.

2.5.3 Model Rekrutmen Politik

Rekrutmen adalah suatu proses yang menentukan bagi partai politik dalam memenuhi jabatan ataupun posisi tertentu. Pipa Norris mengemukakan model rekrutmen politik atas tiga tahap yaitu: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk diantaranya yaitu aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses dimana penyeleksi calon memilih siapa yang akan

dicalonkan didalam pemilu. Pemilu merupakan langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik (Haris dkk, 2016:11).

Sedangkan menurut Menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Riyadh dan Sukmana, 2015:183) dalam melakukan proses rekrutmen terdapat ada lima proses kegiatan dalam model perekrutan politik yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kriteria dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kader sejauh mana proses tersebut dapat dikontrol. Tim yang melakukan proses perekrutan politik menetapkan banyak kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria tersebut, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan dari masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol yang dilakukan akan semakin ketat dan kompetitif.

2.5.4 Sifat-Sifat Rekrutmen Politik

Menurut Labolo dan Ilham (2015:19) mengemukakan sifat rekrutmen dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Sistem Rekrutmen Politik Terbuka,pada sistem rekrutmen terbuka memiliki arti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta memiliki bakat, tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk duduk di jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan.

2. Sistem Rekrutmen Politik Tertutup Sebaliknya, pada sistem rekrutmen tertutup hanya orang-orang tertentu memiliki kesempatan seperti teman-teman dekat, pengusaha, atau individu-individu yang memiliki persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa.

2.5.5 Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rochmawaty (2017:92) mengemukakan tentang jalur rekrutmen dan seleksi politik. Untuk mendapatkan individu yang mempunyai kemampuan dan kualitas yang baik bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan seleksi politik banyak jalur yang digunakan. Beberapa jalur yang dapat digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik yaitu:

1. Jalur koalisi partai pimpinan partai artinya koalisi partai merupakan hal terpenting di dalam melaksanakan rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik diadopsi dari koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak lepas dari peranan koalisi partai.
2. Jalur rekrutmen yang berdasarkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam merekrut seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, pembagian-pembagian kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, secara langsung ataupun secara tidak langsung menguntungkan partai politik.
3. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai wajib melakukan seleksi dan mempersiapkan anggota-

anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam memperoleh jabatan-jabatan politik yang jenjangnya lebih tinggi serta dapat menggerakkan partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.

4. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Pada era modern ini jalur rekrutmen politik primordial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindah tangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini biasa disebut dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial”.

2.5.6 Tipe-Tipe Rekrutmen Politik

Wright dalam (Haris dkk 2016, 14) menjelaskan bahwa dalam rekrutmen politik terdapat dua tipe rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Pertama, model yang efisien, yaitu sebuah proses yang dilaksanakan secara fleksibel dan terbuka. Pada model ini, ketua partai dapat merekrut kandidat dari berbagai kelompok dan kalangan. Model ini tidak dilandaskan pada karier politik yang melembaga. Kedua, model demokrasi internal partai. Tipe model ini lebih keterlembagaan, sesuai dengan tingkatan-tingkatan karir yang jelas, jenjang-jenjang kenaikan jabatan yang terdapat di dalam struktur partai juga lebih kelihatan.

2.6 Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Haris dkk (2016, 74-77) menjelaskan mengenai proses rekrutmen untuk menjadi calon anggota legislatif merupakan hal yang sangat penting karena partai politik dapat memaksimalkan kader terbaiknya untuk menempati posisi anggota legislatif di pusat maupun di daerah. ada tiga tahapan proses rekrutmen yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penjaringan, pada tahap ini partai politik melakukan penjaringan bakal calon anggota legislatif dilaksanakan secara internal kader-kader yang berada di dalam partai politik ataupun dari calon anggota yang berasal dari eksternal partai politik. Kemudian, pada tahap ini rekrutmen internal atau eksternal partai harus memenuhi syarat calon sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang.
2. Penyaringan setelah melewati proses penjaringan, nama-nama tersebut akan diseleksi yang dilakukan antara elit partai pada tingkat cabang dan elit partai pada tingkat daerah.
3. Penetapan, pada tahap ini melibatkan elit partai pada tingkat cabang terutama pengurus harian yang telah dibentuk dan diberi wewenang dalam menetapkan calon.

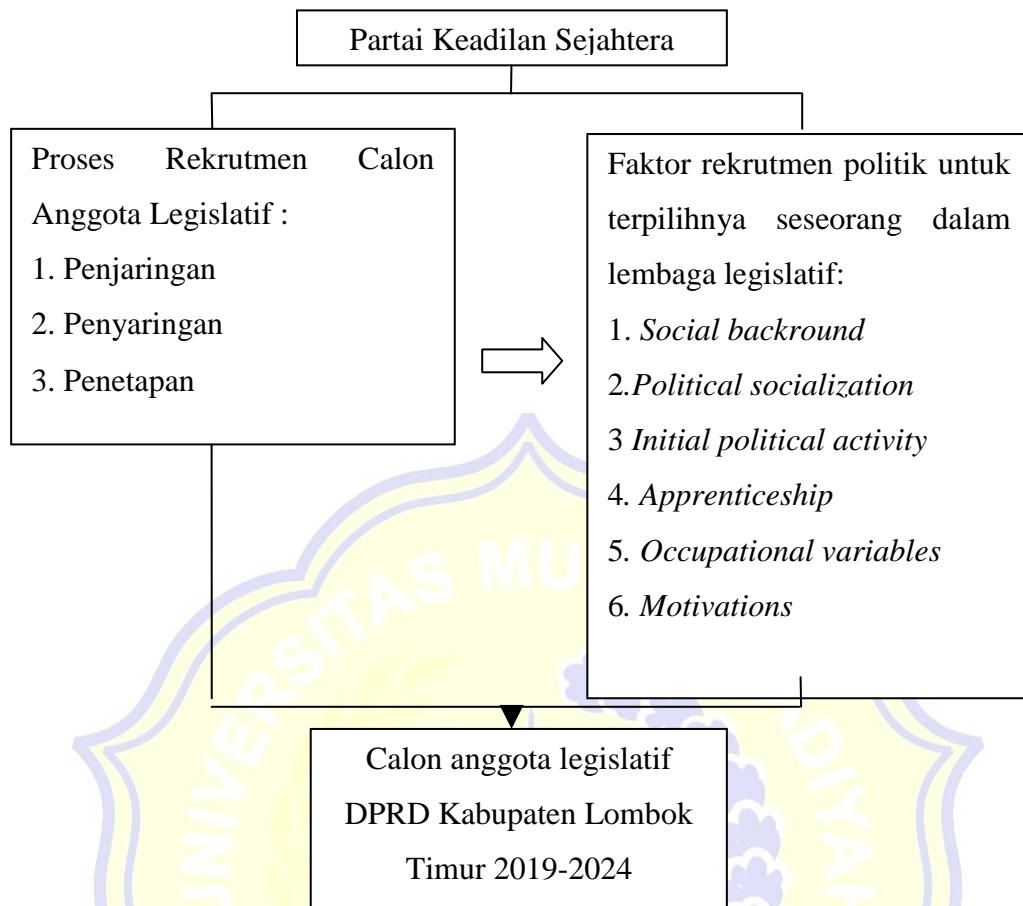
Kemudian Czudnowski dalam (Wibowo, 2018:37) ada beberapa hal yang dapat menentukan proses rekrutmen politik untuk terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif, yaitu

1. *Social backround*, faktor ini berkaitan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang elit dibesarkan.

2. *Political socialization*, merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
3. *Initial political activity*, faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
4. *Apprenticeship*, faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. *Occupational variables*, calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak ada hubungan dengan politik, dan
6. *Motivations*, orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berguna untuk memberikan gambaran terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Skema kerangka berpikir dari penulisan ini memiliki tujuan untuk memperkuat dan lebih memudahkan dalam pemahaman bagi pembaca. Kerangka berpikir dalam penelitian Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan dengan alur di bawah ini sebagai berikut:



2.8. Definisi Konseptual

1. Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang di dalamnya mempunyai anggota-anggota yang mempunyai cita-cita, tujuan yang sama, dan kehendak yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperjuangkan kepentingan politik dari anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Di Indonesia partai politik sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik. Di dalam Undang-Undang tersebut berisi tentang tujuan terbentuknya partai politik. Tujuan Partai politik terdiri dari dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan ini tertuang di dalam pasal 10 ayat 1 dan 2.

Selain memiliki tujuan partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik sarana komunikasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik.

2. Definisi Rekrutmen

Rekrutmen adalah serangkaian proses kegiatan untuk mencari dan menarik sekelompok kandidat untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat untuk pekerjaan.

3. Definisi Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu kegiatan proses mencari dan seleksi yang dilaksanakan oleh partai politik untuk mengajak masyarakat berperan serta di dalam proses politik dan untuk dipersiapkan menjadi generasi-generasi yang dapat memajukan partai politik itu sendiri.

2.8 Definisi Operasional

A. Aspek-Aspek Rekrutmen Politik

1. Penjaringan, Penjaringan adalah tahap dimana proses interaksi antara elite partai yang berada di tingkat lokal atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya anak cabang untuk melakukan penjaringan bakal calon anggota. Indikator dari tahap penjaringan ini yaitu:
 - a. Internal
 - b. Eksternal

2. Penyaringan, Penyaringan adalah tahap yang dilakukan setelah melewati proses penjaringan, nama-nama tersebut diseleksi. Indikator dari tahap penyaringan ini yaitu:

a. Seleksi

3. Penetapan, penetapan adalah proses di mana nama-nama bakal calon anggota legislatif ditetapkan melalui rapat partai. Indikator dari tahap penetapan ini yaitu:

a. Prestasi

b. Dedikasi

B. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik

1. *Social background* adalah faktor yang berkaitan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga.

a. Status sosial

b. Ekonomi

2. *Political socialization* adalah proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.

a. Keterbiasaan

3. *Initial political activity* adalah faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.

a. Pengalaman politik

4. *Apprenticeship* adalah faktor yang menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.

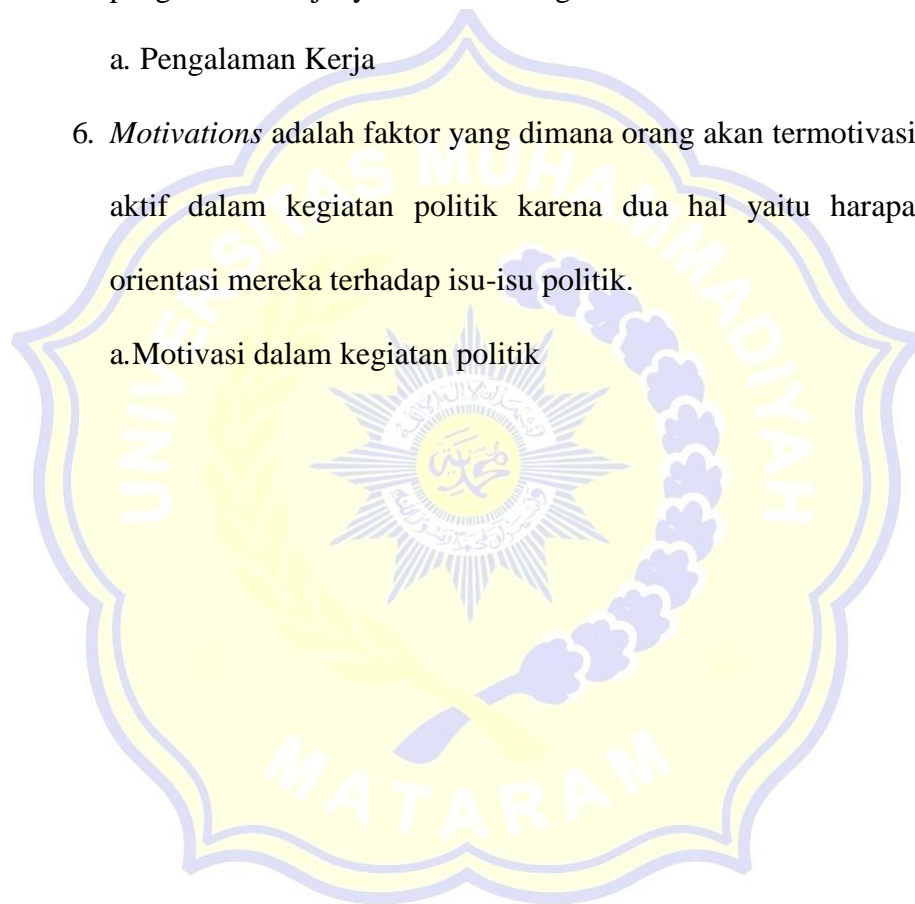
a. Proses Magang

5. *Occupational variables* adalah faktor di mana calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal.

a. Pengalaman Kerja

6. *Motivations* adalah faktor yang dimana orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

a. Motivasi dalam kegiatan politik



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana posisi peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2018:9).

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan suatu subyek/obyek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-lain) selanjutnya dianalisis dan dibandingkan sesuai kenyataan yang masih berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan solusi masalahnya (Widi, 2010:84).

Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah agar peneliti mampu mendeskripsikan mengenai proses rekrutmen politik pada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti akan digunakan dalam proses pengambilan data yang sebenarnya mengenai fenomena yang akan diteliti tentang fungsi rekrutmen politik calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur. Lokasi penelitian adalah Kantor

Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 11B rt 12 Ling. Rumah Sehat Kel Majidi, Kec Selong, Kab Lombok Timur, 83618. Tujuan penulis memilih lokasi penelitian didasarkan karena pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat dan relevan dengan topik permasalahan yang ada. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan.

3.3 Sumber Data

Kriteria data pada penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti merupakan data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang hanya terlihat, terucap, tetapi data yang berisi makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2018:10).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung ketika turun lapangan (dari tangan pertama). Data yang yang didapatkan dari responden bisa melalui kelompok fokus kuesioner, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Nurdin dan Hartati, 2019:172)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melaksanakan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh melalui laporan penelitian terdahulu atau dari perpustakaan. Sumber data yang dijadikan sebagai

data sekunder ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan surat kabar yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder dari penelitian ini yaitu SK-SK PKS, AD/ART PKS, serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

3.4 Teknik Penentuan Responden

Dalam menentukan responden yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja. Maksudnya, teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah mengetahui tentang letak tempat ataupun lokasi yang menjadi objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2018, 2018:95-96) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu mengenai apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/kondisi sosial yang diteliti. Di dalam penelitian ini peneliti memilih informan yang dapat memberikan gambaran dan informasi tentang proses rekrutmen politik.

Tabel. 3.1
Penentuan Responden

No	Nama	Jabatan
1	Murnan, S.Pd	Ketua Umum
2	Ali Imran	Sekretaris Umum
3	Lukman Taupiq, SP	Bidang Kaderisasi Periode
4	TGH. Lalu Wildan Dzikrullah, M.a	Caleg PKS
5	Zaini	Caleg PKS
6	Frikasih, S.E.,Ak	Caleg PKS
7	Muhammad Ali Akbar	Anggota
8	Saprudin	Anggota

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:104).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilaksanakan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2018:105).

Untuk memperoleh data-data yang peneliti perlukan dalam penelitian ini, digunakan berbagai pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Esterberg (dalam Sugiyono: 2018:114).

Esterberg dalam (Sugiyono, 2018:115-116) menjelaskan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui secara pasti mengenai informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi struktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di

mana dalam proses pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara struktural. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan pemikirannya. Wawancara tidak struktural merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan secara sistematis dan lengkap untuk memperoleh datanya. Pedoman wawancara yang dilaksanakan hanya berupa garis-garis besar mengenai permasalahan yang akan ditanyakan oleh peneliti yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2018:124) merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa foto serta data-data yang ada.

3.6 Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada waktu pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Dalam wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dilakukan analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap tertentu, sehingga didapatkan data yang kredibel.

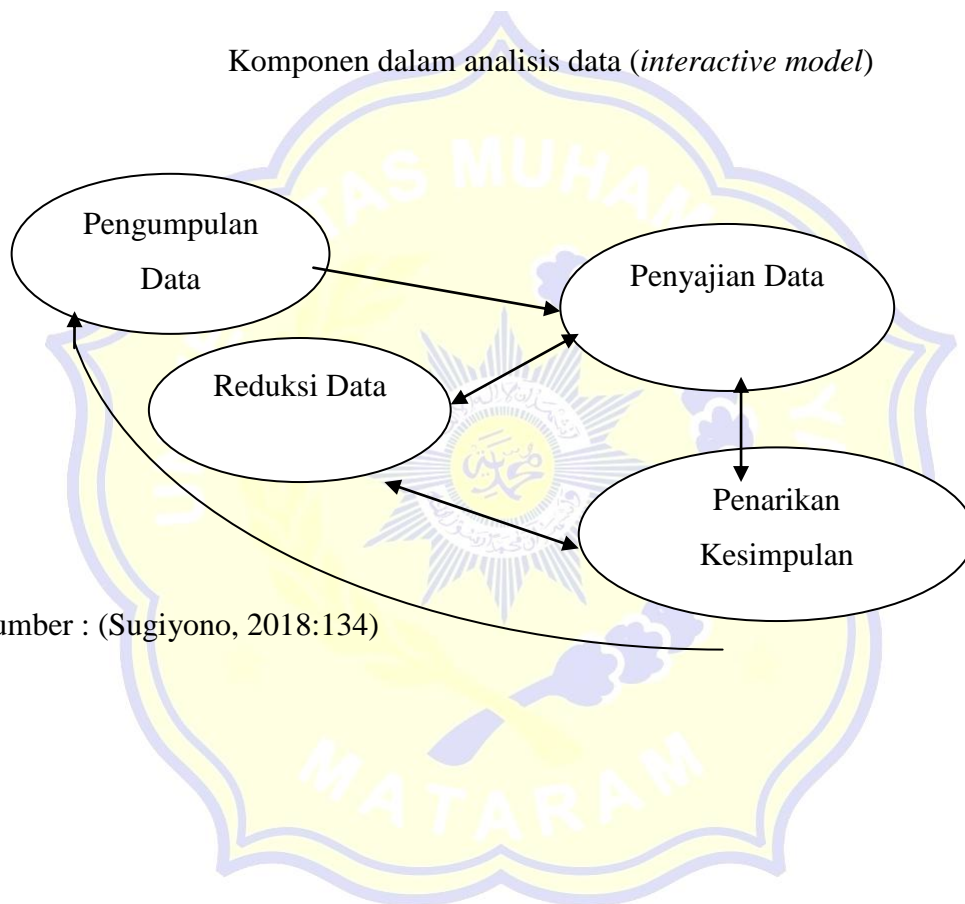
Miles dan huberman dalam (Sugiyono, 2018:132-142) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interkatif berlangsung secara terus menerus hingga selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun kegiatan dalam analisis data terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data, dalam setiap penelitian kegiatan utama adalah mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*)
2. Reduksi Data, yakni data yang didapatkan dari lapangan yang berjumlah cukup banyak, oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila dibutuhkan.
3. Penyajian Data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, ringkasan, hubungan antar kategori, diagram aliran (*Flowchart*) dan sejenisnya. Atau bisa juga dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan, setelah melakukan penyajian data proses yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir dalam menganalisis data, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

Gambar 3.1.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



Sumber : (Sugiyono, 2018:134)